

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS ACTA JURE IMPERII  
PERUSAHAAN YANG DIDUGA BUMN (STUDI TERHADAP KASUS  
EMILIO AGUSTIN MAFFEZINI V. KINGDOM OF SPAIN)**

**Dzulfiki Muhammad Rizki\*, Kholis Roisah, Nanik Trihastuti**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [dzulfikmr@gmail.com](mailto:dzulfikmr@gmail.com)

**Abstrak**

Prinsip pertanggungjawaban negara diterapkan secara khusus oleh ICSID untuk membuat host state mengganti kerugian materiil atas perbuatan BUMN terhadap investor asing. Walaupun demikian, BUMN dianggap sebagai perusahaan swasta yang bertanggung jawab atas segala tindakannya tanpa melibatkan host state. Salah satu upaya untuk membuktikan hal tersebut adalah dengan mengandalkan Pasal 5 *Draft Articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) yang secara khusus mengatur kriteria suatu perusahaan berjenis apapun supaya dapat dibebankan kepada negara selama perusahaan tersebut memiliki kapasitas secara hukum untuk melaksanakan fungsi pemerintahan (*acta jure imperii*). Hal tersebut adalah gambaran dari kasus Maffezini melawan Spanyol yang akan dijadikan sebagai objek utama dalam studi kasus ini. Permasalahan yang diteliti adalah kapasitas SODIGA sebagai BUMN Spanyol sehingga ia dapat digugat oleh Maffezini dan pertanggungjawaban Spanyol terhadap perbuatan SODIGA. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum dianalisis secara komparatif dan *ratio decidendi*, kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SODIGA adalah BUMN karena salah satu fungsinya mengandung sifat pemerintahan, meskipun fungsi-fungsi lainnya mengandung sifat komersial (*acta jure gestionis*). Hal ini juga berarti tidak semua perbuatan BUMN dapat dibebankan kepada negara, namun hanya tindakan yang mencerminkan *acta jure imperii* saja. Penulis menyarankan Pasal 31 *Vienna Convention* sebagai alternatif guna menafsirkan klausa-klausa Pasal 25 Konvensi ICSID dan juga mempertimbangkan faktor-faktor penentu suatu tindakan negara selain sifat, yaitu tujuan atau konteks.

**Kata kunci:** Acta Jure Imperii; BUMN; Pertanggungjawaban Negara; Perusahaan Swasta

**Abstract**

*The principle of state responsibility is specifically applied in the International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) to compel host state compensates for material losses for actions of the State-Owned Enterprise (SOE) have committed against foreign investors. Nevertheless, the SOE is considered a private company that is responsible for all its actions without involving the host state. In a way to prove this allegation, by relying on Article 5 of Draft Articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) regulates the threshold for any enterprise attributable to the state as long as the company has a legal capacity to conduct governmental functions (acta jure imperii). These facts fully describe the case of Maffezini v. Spain which will serve as the main object in this case study. Its legal issues consist of capacity of SODIGA as the SOE of Spain which Maffezini is entitled to sue and responsibility of Spain for SODIGA's acts. This research relied on the method of normative juridical approach and legal materials collected through library research. The legal materials are comparatively analyzed with ratio decidendi and descriptively elaborated. SODIGA is proven as a SOE because its functions include the nature of governmental, despite the other functions found to be commercial in nature (acta jure gestionis). Particularly, not entire acts committed by SOE are attributable to the state, but rather acts that reflect the acta jure imperii. The author suggests ICSID to consider the application of Article 31 of the Vienna Convention as an alternative to*

*interpretate Article 25 of the ICSID Convention and considering the determinants of a state's actions in addition to their nature, i.e. purpose, or context.*

**Keywords:** *Acta Jure Imperii; SOE; State Responsibility; Private Company*

## I. PENDAHULUAN

Prinsip Pertanggungjawaban Negara secara umum mencakup seluruh aspek dalam berbagai jenis sengketa hukum internasional antara subjek-subjek hukum internasional.<sup>1</sup> Hal ini termasuk sengketa hukum yang diajukan kepada International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang memusatkan yurisdiksinya pada hukum investasi internasional sesuai Pasal 25 (1) Konvensi ICSID yang hanya akan mengadili sengketa hukum antara investor asing dengan negara penerima modal (*host state*). Ketentuan tersebut juga berarti mengecualikan sesama negara atau sesama warga negara, untuk menjadi pihak bersengketa di hadapan ICSID.<sup>2</sup>

Investor asing mengklaim bahwa *host state* harus bertanggungjawab atas perbuatan badan hukum miliknya yang bertentangan atau melanggar kewajiban internasional yang telah tertuang dalam Bilateral Investment

Treaty tertentu (BIT).<sup>3</sup> Sementara itu, *host state* menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan dari perbuatan badan hukum tersebut atas dasar ia memiliki kepribadian hukum terpisah (*separate legal personality*).<sup>4</sup>

Peristiwa tersebut sebenarnya paling tepat untuk menggambarkan sengketa yang diajukan oleh Maffezini, sebagai Investor Argentina, yang investasinya telah diperlakukan secara diskriminatif oleh badan hukum Spanyol bernama Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galicia Sociedad Anonima (SODIGA). Investasi Maffezini berbentuk modal asing yang ditanamkan dalam perusahaan *joint venture* bersama SODIGA yang bergerak di bidang industri kimia bernama EAMSA. EAMSA didirikan dengan porsi saham Maffezini sebesar 70%, sedangkan

---

<sup>1</sup> International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries*, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1, p. 32-33, p. 36, para 1, available at: [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9\\_6\\_2001.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf) [accessed 16 April 2020]

<sup>2</sup> Aron Broches, *The Convention on the Settlement of Investment Disputes: Some Observations on Jurisdiction*, Columbia Journal of International Law, Vol. 5, 1966, 263, p. 265.

---

<sup>3</sup> *Report of the Executive Directors on the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, 1 ICSID Reports 25, 1965, para. 10, p. 40, available at: [https://icsid.worldbank.org/en/Pages/icsid\\_docs/REPORT-OF-THE-EXECUTIVE-DIRECTORS-ON-THE-ICSID-CONVENTION.aspx](https://icsid.worldbank.org/en/Pages/icsid_docs/REPORT-OF-THE-EXECUTIVE-DIRECTORS-ON-THE-ICSID-CONVENTION.aspx) [accessed 16 April 2020]

<sup>4</sup> *United States v. Deutsches Kalisyndikat Gesellschaft*, 31 F.2d 199 (S.D.N.Y. 1929), available at: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/F2/31/199/1496581/> [accessed 15 April 2020]

porsi saham 30% dipegang SODIGA.<sup>5</sup>

Maffezini mengklaim bahwa SODIGA, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Spanyol yang memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi publik/pemerintahan (*acta jure imperii*), oleh karena itu, Spanyol wajib bertanggung jawab atas segala perbuatan SODIGA. Maffezini kemudian menambahkan bahwa SODIGA telah melanggar kewajiban tertentu dalam BIT Argentina-Spanyol tahun 1991. Maffezini, sebagai penggugat, rupanya memohon kompensasi moneter sebagai bentuk ganti rugi materi.<sup>6</sup>

Bagaimanapun juga, pemerintah tetap menolak keterlibatannya dalam pelanggaran BIT Argentina-Spanyol tahun 1992 karena sengketa tersebut seharusnya diselesaikan antara investor asing dengan badan hukum non-negara, yang dalam hal ini, antara Maffezini dan SODIGA. Spanyol menolak untuk mengakui SODIGA sebagai badan hukum negara karena sesungguhnya ia adalah perusahaan finansial swasta yang beroperasi di bidang transaksi komersial (*acta jure gestionis*).<sup>7</sup> Hal ini dapat mengakibatkan semua dugaan pelanggaran hukum yang telah dilakukan SODIGA tidak dapat dibebankan kepada Spanyol sehingga gugatan mengenai tanggung jawab

negara yang diajukan oleh Maffezini kemungkinan besar akan batal demi hukum.

ICSID mengalami kendala dalam menentukan dasar hukum apa yang harus digunakan untuk mempertimbangkan gugatan Maffezini. Pasal 25 (3) Konvensi ICSID merupakan kunci utama untuk memastikan kedudukan hukum suatu badan hukum publik atau swasta, guna mewakili negaranya untuk menjadi pihak sengketa, tentunya selama badan hukum tersebut telah disahkan oleh negara.<sup>8</sup> Dalam hal ini, Spanyol tidak mengizinkan SODIGA untuk mewakilinya di hadapan ICSID dan, pada saat itu, tidak ada pedoman resmi dari Konvensi ICSID yang diberikan untuk menafsirkan unsur-unsur apa yang harus membentuk BUMN atau badan hukum negara secara umum.<sup>9</sup> Kondisi tersebut tentu akan menguntungkan Spanyol karena dugaan pelanggaran SODIGA tidak akan bisa dibebankan kepada Spanyol.

ICSID akhirnya memutuskan untuk mengadopsi ketentuan Pasal 5 ARSIWA yang telah diakui oleh ICSID sebagai hukum kebiasaan

<sup>5</sup> *Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain*, ICSID Case No. ARB/97/7, Award, 13 November 2000, para. 39, available at: <https://www.italaw.com/cases/641> [accessed 16th April 2020]

<sup>6</sup> *Ibid*, para. 94

<sup>7</sup> *Ibid*, para. 45

<sup>8</sup> Christoph H. Schreuer, Loretta Malintoppi, et. al, *The ICSID Convention: A Commentary* (2<sup>nd</sup> Ed), Cambridge University Press, 2009, p. 338, available at: <https://doi.org.proxy.undip.ac.id/10.1017/CBO9780511596896> [accessed 15th July 2020]

<sup>9</sup> *Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain*, ICSID Case No. ARB/97/7, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, 25 January 2000, para 74, available at: <https://www.italaw.com/cases/641> [accessed 16 April 2020]

internasional.<sup>10</sup> Ketentuan tersebut dirumuskan menjadi tes struktural dan tes fungsional yang harus dipenuhi untuk memutuskan apakah perusahaan swasta dapat dinyatakan sebagai BUMN. Kedua tes tersebut juga dapat diterapkan untuk menjawab gugatan mengenai konsep pembebanan yang mengharuskan negara bertanggung jawab atas pelanggaran suatu perusahaan terhadap BIT. Indikator untuk membuktikan bahwa perusahaan swasta sesungguhnya adalah BUMN bergantung pada *acta jure imperii* yang harus dibuktikan eksistensinya. *Acta jure imperii* juga dianggap sebagai dasar adanya pertanggungjawaban negara atas perbuatan badan hukum tertentu.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah SODIGA memiliki kapasitas dalam menjalankan *acta jure imperii* sebagai BUMN Spanyol supaya ia dapat digugat oleh Maffezini?
2. Apakah Spanyol bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan SODIGA?

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif guna meneliti data sekunder berdasarkan hukum positif atau

peraturan-peraturan lain.<sup>12</sup> Pendekatan akan berfokus pada putusan akhir Maffezini melawan Spanyol dengan mengandalkan Konvensi ICSID, BIT Argentina-Spanyol, dan ARSIWA sebagai dasar hukum.

Penelitian ini juga menerapkan spesifikasi penelitian preskriptif.<sup>13</sup> Hal ini bertujuan untuk menjelaskan status hukum SODIGA supaya ia dapat digugat di hadapan ICSID sehingga majelis kemudian dapat melanjutkan pertimbangannya mengenai pertanggungjawaban Spanyol atas pelanggaran SODIGA pada tahap pokok perkara.

Penelitian ini berbasis data sekunder yang diambil melalui studi kepustakaan dan situs jejaring yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berbagai jenis bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun, diolah, dan dianalisis dengan penafsiran komparatif guna menyelesaikan permasalahan hukum dengan cara membandingkan bermacam-macam stelsel hukum dan penafsiran rasio-legis untuk mencari maksud atau tujuan dari suatu hukum positif.<sup>14</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kapasitas SODIGA Sebagai BUMN Spanyol Agar Dapat Digugat Oleh Maffezini di Hadapan ICSID

<sup>10</sup> *Noble Ventures, Inc. v. Romania* (ICSID Case No. ARB/01/11), Award, 12 October 2005, para. 70, available at: <https://www.italaw.com/cases/747> [accessed 11 November 2020]

<sup>11</sup> *Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain*, *op.cit.*, para. 77

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 22.

<sup>14</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 166.

Maffezini harus membuktikan bahwa SODIGA adalah BUMN Spanyol supaya dapat menjadi pihak yang dianggap sebagai negara anggota. Alasan mengapa BUMN dapat mengatasnamakan negara adalah fakta bahwa ia memiliki 2 (dua) kapasitas, yaitu untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan fungsi komersial.<sup>15</sup> Fungsi pemerintahan atau *acta jure imperii* adalah kunci utama suatu BUMN dapat dianggap mengatasnamakan negaranya.

Cara untuk membuktikan bahwa SODIGA merupakan BUMN adalah dengan menjalankan tes struktural dan tes fungsional yang mengadopsi ketentuan dari Pasal 5 ARSIWA. Kedua tes tersebut akan dijalankan secara bertahap dimulai dari tes struktural terlebih dahulu kemudian tes fungsional.

Tes struktural adalah doktrin yang diterapkan secara khusus oleh majelis ICSID untuk menilai status suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum nasional. Hukum nasional tersebut berisi klausa susunan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu badan hukum agar dapat dianggap sebagai organ negara.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hazel Fox and Philippa Webb, *The Law of State Immunity* (3<sup>rd</sup> Ed.), The Oxford International Law Library, 2013, p. 403-405, available at: <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780198744412.001.0001/law-9780198744412>

<sup>16</sup> *PNG Sustainable Development Program Ltd. v. Independent State of Papua New Guinea*, ICSID Case No. ARB/13/33, Award, 5 May 2015, para. 124, available at: <https://www.italaw.com/cases/2770> [accessed 5 May 2020]

Syarat yang harus dipenuhi SODIGA dalam tes struktural adalah adanya prosedur hukum yang mengesahkan pendiriannya. Kementerian Industri Spanyol mengajukan proposal pendirian SODIGA kepada Kementerian Keuangan untuk diperiksa dan disetujui. Kemudian, hasil dari persetujuan tersebut diberikan kepada Dewan Kementerian untuk dibahas dan disetujui pada rapat umum.<sup>17</sup> Hasil akhir dari prosedur hukum tersebut adalah terbitnya Dekrit 2182/1972 yang mengesahkan pendirian SODIGA.<sup>18</sup> Dengan demikian, dekrit tersebut sudah cukup untuk membuktikan eksistensi hukum nasional yang berperan untuk mendirikan SODIGA.

Pengundangan Dekrit 2182/1972 tidak cukup untuk menyebabkan SODIGA otomatis menjadi BUMN Spanyol. Eksistensi kontrol pemerintah terhadap SODIGA juga harus dibuktikan. Kontrol pemerintah berguna untuk membuktikan campur tangan dan kendali suatu negara terhadap perusahaan dengan cara melihat kepemilikan saham negara. Hal ini disebabkan bahwa selain adanya pengesahan secara hukum, pendirian BUMN itu sendiri mengharuskan adanya dominasi saham dari pemerintah.<sup>19</sup> Dominasi saham

---

<sup>17</sup> Decreto 2182/1972, de 21 de julio, por el que se constituye la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galicia (SODIGA), available at: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1972-1233> [accessed at 1 June 2020]

<sup>18</sup> *Loc.cit.*

<sup>19</sup> *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition*, OECD Publishing, 2015, Paris, available at:



mengakibatkan tindakan pemegang saham, yang dalam kasus ini adalah pemerintah itu sendiri, seolah-olah merupakan tindakan perusahaan.<sup>20</sup>

Pada kasus ini, Pemerintah Spanyol bukanlah pemegang saham SODIGA secara langsung melainkan ia menugaskan BUMN yang bernama *Instituto Nacional de Industria* (INI) untuk mendirikan SODIGA dan memegang sahamnya sebesar 51%. Beberapa waktu kemudian, saham SODIGA dibeli oleh beberapa badan hukum Spanyol lainnya yang terdiri dari *Xunta de Galicia*, Asosiasi Simpan-Pinjam (*Cajas de Ahorros*), Agen pengembangan daerah, dan *Banco Exterior de Espana* yang mengakibatkan dominasi saham Spanyol meningkat drastis menjadi 88%.

Bukti tersebut juga diperkuat dengan kapasitas INI untuk mengontrol secara absolut atas bidang usaha yang ia jalankan sesuai dengan Pasal 2 UU 25/1941 tentang Pembentukan INI. Tidak hanya demikian, INI juga akan menjalankan berbagai macam industri yang diperintahkan oleh pemerintah Spanyol.<sup>21</sup>

---

<https://www.oecd.org/publications/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015-9789264244160-en.htm> [accessed 18 April 2020]

<sup>20</sup> Ian M. Ramsey and David B. Noakes, *Piercing the Corporate Veil in Australia*, 19 (4), *Company and Securities Law Journal* 250, 2001, p. 250.

<sup>21</sup> *Ley de 25 de septiembre de 1941 por la que se crea el Instituto Nacional de Industria*, Boletín Oficial del Estado, BOE-A-1941-95471941, available at: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1941-9547> [accessed at 18 June 2020]

Sebagai perbandingan, terdapat kasus yang menghubungkan secara erat faktor pendirian melalui kepemilikan saham dan faktor pendirian melalui hukum nasional, yaitu kasus Salini melawan Maroko. ADM adalah perusahaan yang dikendalikan oleh Pemerintah Maroko melalui perantara negara yaitu bendahara dan organ negara lainnya, dengan dominasi saham mereka sebesar 89%. Bukti lain ditemukan pada Pasal 20 akta pendirian ADM yang menegaskan bahwa ADM diatur oleh dewan yang terdiri dari minimal lima orang anggota dan maksimal 20 orang anggota, yang dipilih melalui Rapat Umum atau keputusan bersama dewan. Selain itu, Pasal 35 menerangkan bahwa Rapat Umum terdiri dari pemegang saham, terlepas dari berapapun nominal sahamnya.<sup>22</sup>

Kedua pasal tersebut memberikan kuasa bagi para pemegang saham ADM yang mayoritas terdiri dari perwakilan pemerintah untuk mengendalikan secara penuh laju dan kegiatan perusahaan. Pasal 27 akta pendirian ADM bahkan menyatakan bahwa dewan pemegang saham memiliki kewenangan paling tinggi untuk bertindak atas nama perusahaan sehingga ia dapat menyetujui seluruh kegiatan operasional, selama kegiatan tersebut memang dihendaki oleh RUPS. ADM terbukti merupakan perusahaan yang dikontrol secara absolut oleh

---

<sup>22</sup> *Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco*, ICSID Case No. ARB/00/4, Decision on Jurisdiction, 23 July 2001, para. 32, available at: <https://www.italaw.com/cases/documents/959> [accessed at 2 June 2020]

pemerintah Maroko melalui organ-organ negaranya.<sup>23</sup>

Kasus Salini sangat jelas menentukan hak dan wewenang para pemegang saham, tidak seperti kasus Maffezini. Dekrit 2182/1972 memang diundangkan sebagai bukti formal adanya pengesahan hukum nasional atas pendirian SODIGA serta jumlah saham negara, namun klausa di dalamnya tidak menentukan secara eksplisit hak dan kewenangan para pemegang saham yang dapat menimbulkan dugaan kuat adanya kontrol secara absolut atau efektif.<sup>24</sup> Alasan tersebut merupakan dasar adanya penyelidikan lebih lanjut terhadap statuta yang mendirikan *Xunta de Galicia* dan INI supaya timbul indikasi-indikasi kontrol secara efektif terhadap SODIGA. Walaupun demikian, SODIGA tetap memenuhi kriteria tes struktural karena ia didirikan melalui otorisasi dan campur tangan lembaga eksekutif.<sup>25</sup>

Bagaimanapun juga, perusahaan swasta tidak dapat dianggap otomatis menjadi BUMN apabila negara hanya terbukti mendominasi sahamnya. Pada kasus *Waste Management* melawan Mexico, terdapat perusahaan yang bernama Banobras yang diduga merupakan organ negara Mexico. Saham Banobras memang dimiliki oleh pemerintah Mexico sebesar 66%, namun majelis menyatakan bahwa besarnya jumlah saham tidak membuat Banobras menjadi suatu

lembaga negara Mexico.<sup>26</sup> Faktor terakhir yang harus dibuktikan adalah adanya kapasitas perusahaan swasta untuk melaksanakan fungsi pemerintahan.<sup>27</sup>

Tes fungsional akan dijalankan untuk menilai kapasitas macam apa yang dimiliki oleh SODIGA. Tes fungsional adalah doktrin untuk menilai kegunaan atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh organ negara.<sup>28</sup> Tes ini bertujuan untuk menganalisis apakah suatu tindakan organ negara bersifat *acta jure imperii* atau komersial (*acta jure gestionis*).<sup>29</sup> Suatu perusahaan dapat dianggap memenuhi tes fungsional ketika ia memiliki kegunaan dan tujuan yang bersifat publik/pemerintahan atau fungsi yang secara normal dilakukan oleh negara atau fungsi yang secara normal tidak dilakukan oleh perusahaan komersial.<sup>30</sup>

Penerapan tes fungsional dapat didasarkan pada hasil tes struktural sebelumnya. Hal ini disebabkan Pasal 5 ARSIWA akan membenarkan adanya pembebanan tindakan kepada negara selama perusahaan memiliki kapasitas yang disahkan secara hukum. Hukum atau undang-undang tersebut

<sup>23</sup> *Loc.cit.*

<sup>24</sup> Pasal 2 & Pasal 3 Decreto 2182/1972

<sup>25</sup> International Law Commission, *op.cit.*, pp. 42-43.

<sup>26</sup> *Waste Management, Inc. v. United Mexican States ("Number 2")*, (ICSID Case No. ARB(AF)/00/3) Award, 30 April 2004, para. 75, available at: <https://www.italaw.com/cases/1158> [accessed 8 May 2020].

<sup>27</sup> International Law Commission, *op.cit.*, p. 43, para.3.

<sup>28</sup> *Ibid.*, paras. 83-84

<sup>29</sup> PNG Sustainable Development Program Ltd. v. Independent State of Papua New Guinea, *loc.cit.*

<sup>30</sup> Maffezini v. Spain, Decision of Tribunal on Objection to Jurisdiction, *op.cit.*, para. 77.

mengandung klausa yang menetapkan fungsi-fungsi perusahaan guna menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Fungsi-fungsi perusahaan secara umum mencerminkan sifat *acta jure gestionis* yang normalnya dilakukan oleh perorangan swasta di bidang bisnis.<sup>31</sup> Disamping itu, fungsi-fungsi yang diduga mencerminkan *acta jure imperii* dapat diidentifikasi berdasarkan tindakan yang pada umumnya dilaksanakan oleh negara.<sup>32</sup> Hal yang harus diperhatikan adalah sifat atau kodrat dari suatu tindakan dalam rangka membedakan antara fungsi komersial (*acta jure gestionis*) dengan fungsi pemerintahan (*acta jure gestionis*).<sup>33</sup>

Pada kasus ini, pembukaan dalam Dekrit 2182/1972 menegaskan bahwa tujuan pembentukan SODIGA adalah guna mendorong pengembangan industri daerah di Daerah Otonom Galicia.<sup>34</sup> SODIGA juga memiliki beberapa fungsi untuk melakukan studi guna mengenalkan industri-industri baru di Galicia, melaksanakan pencarian dan membujuk industri-industri baru tersebut, melakukan investasi pada

perusahaan-perusahaan baru, memproses alur registrasi pinjaman yang berasal dari pembiayaan resmi, menyediakan jaminan atas pinjaman tersebut, dan menyediakan bantuan teknis. Selain itu, SODIGA juga ditugaskan oleh INI untuk membantunya dalam menyediakan subsidi dan memberikan penawaran menarik kepada calon investor asing guna mengembangkan industri di daerah Galicia.<sup>35</sup> Dengan demikian, beberapa fungsi yang telah disebutkan diduga mencerminkan kedua fungsi BUMN yang berbeda yakni *acta jure imperii* dan *acta jure gestionis*.

Fungsi SODIGA untuk memberikan pinjaman, pada umumnya dilakukan oleh perusahaan swasta atau bank finansial, namun pinjaman dari perusahaan swasta tidak dapat disamakan dengan yang diberikan oleh negara. Pinjaman yang diberikan oleh negara sejatinya merupakan bentuk subsidi guna memberikan kemudahan bagi sektor swasta dalam mengembangkan bisnisnya di wilayah negara tersebut. Hal ini disebabkan karena negara memiliki agenda politik atas diberikannya pinjaman kepada pihak kedua agar pihak kedua membantu mewujudkan apa yang menjadi kepentingan negara saat ini.<sup>36</sup> Kepentingan pemerintah Spanyol adalah bagaimana caranya agar industri di Galicia berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, pinjaman yang disediakan oleh SODIGA kepada perusahaan-perusahaan yang baru didirikan merupakan bentuk *acta jure imperii*

<sup>31</sup> Mark McLaughlin, *Defining a State-Owned Enterprise in International Investment Agreements*, ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Volume 34, Issue 3, Fall 2019, pp. 595-625, available

at: <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siz011> [accessed at 22 June 2020]

<sup>32</sup> Hazel Fox and Philippa Webb, *op.cit.*, pp. 403-405

<sup>33</sup> *Ceskoslovenska Obchodni Banka, A. S. v. the Slovak Republic, ICSID Case No. ARB/97/4, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, 24 May 1999*, para. 20, available at: <https://www.italaw.com/cases/238>

<sup>34</sup> *Loc.cit.*

<sup>35</sup> Pasal 3 Statuta INI

<sup>36</sup> Hazel Fox & Philippa Webb, *op.cit.*, p. 418.



baik ditinjau dari tujuan maupun sifat.

## B. Pertanggungjawaban Spanyol atas Segala Perbuatan yang Telah Dilakukan SODIGA

Pada prinsipnya, pelanggaran hukum internasional timbul ketika suatu tindakan badan hukum dapat dibebankan kepada negara dan bertentangan dengan kewajiban negara tersebut.<sup>37</sup> Unsur pembebanan hadir untuk mencakup kapasitas negara dalam bertindak karena negara tidak dapat bergerak tanpa “kaki tangan” miliknya yang dapat berupa badan hukum swasta ataupun milik negara.

Pasal 5 ARSIWA memberikan syarat kumulatif supaya badan-badan hukum ini dapat dibebankan kepada negara. Syarat pertama yang harus dipenuhi yaitu badan hukum harus disahkan secara hukum untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Diikuti oleh syarat kedua yaitu perbuatan badan hukum tersebut harus memiliki hubungan dengan fungsi pemerintahan tersebut. Sebagai contoh, beberapa negara menyewa jasa pengamanan swasta untuk bertugas sebagai penjaga lapas sehingga ia memiliki kemampuan yang berhubungan dengan tugasnya seperti melakukan penahanan dan pendisiplinan sesuai putusan pengadilan atau undang-undang.<sup>38</sup>

Poin yang harus ditekankan adalah sifat dari suatu fungsi. Sebesar apapun wewenang atau kuasa yang dimiliki oleh suatu BUMN, jika sifat dari fungsinya adalah murni komersial atau *acta*

*jure gestionis*, maka perusahaan tersebut tidak dapat dianggap mampu menjalankan perbuatan yang bersifat *acta jure imperii*.<sup>39</sup> Oleh karena itu, syarat pertama tidak akan terpenuhi apabila tindakan atau fungsi yang disahkan bersifat komersial dan mengakibatkan syarat kedua juga akan bernasib sama dengan syarat pertama. Hal ini juga berlaku sama ketika syarat pertama telah terpenuhi namun syarat kedua tidak demikian. Sebagai contoh, perusahaan kereta yang diberikan wewenang untuk menjalankan fungsi pemerintahan namun apabila tindakan yang digugat adalah penjualan tiket kereta maka ia tidak dapat dibebankan oleh negara.<sup>40</sup>

Pemenuhan syarat pertama dalam kasus ini ditunjukkan melalui pemberian wewenang oleh pemerintah Spanyol kepada SODIGA berdasarkan Dekrit 2182/1972 yang fungsi pemerintahannya tercantum dalam pembukaan dekret bahwa SODIGA bertujuan untuk mendorong laju industri daerah agar berkembang pesat demi kepentingan Daerah Otonom Galicia. Perlu dicatat bahwa SODIGA bertugas mempromosikan keuntungan menanam modal di Galicia agar calon investor asing tertarik. Hal ini akan berbeda jika SODIGA beroperasi pada aktifitas industri karena kapasitas yang ia

---

<sup>39</sup> *EBO Invest AS, Rox Holding AS and Staur Eiendom AS v. Republic of Latvia*, ICSID Case No. ARB/16/38, Award, 28 February 2020, paras. 342-343, available at: <https://www.italaw.com/cases/8031> [accessed 29 May 2020].

<sup>40</sup> International Law Commission, *op.cit.*, p. 43.

---

<sup>37</sup> Pasal 2 ARSIWA

<sup>38</sup> International Law Commission, *op.cit.*, p. 43.

miliki akan berubah menjadi fungsi komersial secara umum.<sup>41</sup>

Selanjutnya syarat kedua, yaitu dugaan pelanggaran SODIGA yang telah diperbuat terhadap Maffezini. Pada kasus ini, Spanyol diduga melakukan *internationally wrongful acts* dengan melanggar Pasal 2 (1), Pasal 3 (1), dan Pasal 4 BIT Argentina-Spanyol 1992 yang menyebabkan Maffezini mengalami kerugian materiil atas investasinya pada EAMSA.

Isi gugatan akan dianalisis mulai dari dapat atau tidaknya tindakan SODIGA dibebankan kepada Spanyol. Analisis selanjutnya akan menilai sifat dari tindakan-tindakan SODIGA, baik tergolong pemerintahan atau komersial.

Dugaan pelanggaran pertama yaitu kekeliruan saran yang diberikan SODIGA oleh Maffezini, bermula dari rancangan biaya pembangunan proyek yang telah diperkirakan sebelumnya, ternyata menjadi lebih mahal setelah pembangunan selesai. Maffezini menduga rancangan tersebut berasal dari laporan SODIGA yang berisi analisis guna menentukan kelayakan proyek.<sup>42</sup>

Pada kasus ini, SODIGA menjalankan uji kelayakan semata-mata untuk mempertimbangkan partisipasinya dalam saham EAMSA. Selain itu, SODIGA tidak terbukti memberikan saran kepada Maffezini sehingga tidak ada dugaan

pelanggaran, sebab segala kerugian yang dialami oleh Maffezini berasal dari kecerobohannya sendiri. Oleh karena itu, SODIGA tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kenaikan biaya yang diderita Maffezini.<sup>43</sup>

Walaupun SODIGA tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran terhadap Maffezini, fungsi SODIGA tetap akan ditinjau. Fungsi SODIGA yang sebelumnya dipermasalahkan, adalah untuk menyediakan informasi kepada investor dan pebisnis. Kegiatan ini secara sifatnya tidak lebih dari sekedar layanan jasa bersifat komersial yang disediakan oleh perusahaan finansial kepada klien-kliennya.<sup>44</sup> Sebagai tambahan, layanan informasi ini bertujuan untuk membantu para klien dalam mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil demi keuntungan mereka pribadi. Dengan ini SODIGA tidak melaksanakan fungsi pemerintahan apapun ketika ia menyediakan informasi dalam bentuk laporan kepada EAMSA sehingga Spanyol tidak bertanggung jawab atas kekeliruan saran yang dilakukan SODIGA terhadap Maffezini.<sup>45</sup>

Dugaan pelanggaran kedua yaitu prosedur AMDAL yang belum difinalisasikan, bermula dari tuduhan Maffezini bahwa SODIGA diduga juga bertanggung jawab atas biaya tambahan atas uji AMDAL terhadap lahan pembangunan. Maffezini berdalih bahwa ia didesak oleh *Xunta de Galicia* untuk melanjutkan

---

<sup>41</sup> Pasal 2 (1) (c) (iii) *Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property*, available at: [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4\\_1\\_1991.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4_1_1991.pdf) [accessed 28 May 2020]

<sup>42</sup> Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain, Award, *op.cit.*, para. 58.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, para. 63.

<sup>44</sup> Hazel Fox & Phillipa Webb, *op.cit.*, p. 418.

<sup>45</sup> *Ibid*, para. 62

pembangunan tanpa menyelesaikan prosedur AMDAL.

Faktanya, Maffezini dengan sengaja langsung mengakuisisi lahan tanpa mempertimbangkan kembali dampak terhadap lingkungan maupun akibat hukumnya. Para pegawai dan konsultan yang disewa Maffezini telah memberikan nasihat kepadanya atas ketentuan-ketentuan AMDAL berdasarkan hukum Spanyol dan Masyarakat Ekonomi Eropa, terutama karena proyek EAMSA melibatkan industri berbahaya kimia yang sangat berbahaya dan beracun.<sup>46</sup> Akan tetapi, Maffezini tidak menghiraukan saran mereka.

Spanyol mewajibkan pelaksanaan AMDAL kepada seluruh industri kimiawi sesuai Instruksi Masyarakat Ekonomi Eropa 85/337 Tahun 1985,<sup>47</sup> dan Dekrit Legislatif No. 1302/1986.<sup>48</sup> Kedua dasar hukum tersebut juga sesuai dengan amanat untuk melindungi lingkungan di wilayah Spanyol sesuai Pasal 45 ayat 2 Konstitusi 1978 yang menegaskan bahwa “Otoritas negara yang mengandalkan solidaritas publik harus memastikan bahwa semua sumber daya alam digunakan secara rasional, dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup dan

melindungi serta memulihkan lingkungan.”<sup>49</sup>

Spanyol juga terbukti menjalankan komitmennya untuk mendorong laju investasi asing selama sesuai dengan ketentuan hukum nasionalnya. Upaya Spanyol sejalan dengan bunyi Pasal 2 (1) BIT Argentina-Spanyol yang menegaskan bahwa “*Each Party shall, ... promote investments made in its territory by investors... in accordance with its legislation*”.<sup>50</sup> Pasal ini secara tersirat mewajibkan investor asing untuk menaati dan menjalankan prosedur hukum *host state* demi menjaga aspek-aspek penting negara yang kemungkinan terkena dampak dari aktifitas bisnis investor.

Pemerintah Spanyol dan SODIGA hanya menuntut Maffezini untuk mematuhi prosedur AMDAL sesuai hukum. Oleh karena itu, majelis menyatakan bahwa Spanyol tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kecerobohan yang disebabkan oleh Maffezini terkait AMDAL.<sup>51</sup>

Dugaan pelanggaran terakhir yaitu pengiriman dana yang tidak sah, bermula dari praduga bahwa pinjaman sebesar 30 juta peseta yang dikirim melalui rekening pribadi

<sup>46</sup> *Ibid*, para. 66.

<sup>47</sup> EEC Directive 85/337, June 27, 1985, available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0337> [accessed 27 May 2020]

<sup>48</sup> Real Decreto Legislativo No. 1302/1986, June 28, 1986, available at: <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1986/06/28/1302> [accessed at 27 May 2020]

<sup>49</sup> *López Ostra v. Spain*, Case No. 41/1993/436/515, December 9, 1994, para. 23, available at: <https://hudoc.echr.coe.int/rus#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-57905%22%5D%7D> [accessed at 26 May 2020]

<sup>50</sup> *Agreement Between The Argentine Republic and The Kingdom of Spain on The Reciprocal Promotion and Protection of Investment*, 1992, available at: <https://wipo.int/wipolex/en/text/247353> (accessed on 2 October 2020)

<sup>51</sup> Emilio Agustin Maffezini v. The Kingdom of Spain, Award, *op.cit.*, para. 71

Maffezini kepada EAMSA, itu tidak sah karena Luis Banos, selaku perwakilan SODIGA, belum meminta izin kepada Maffezini untuk mengeksekusi transaksi tersebut. Pemerintah Spanyol diduga kurang transparan dalam menjalankan transaksi dana karena tidak mengadakan kontrak dengan Maffezini terkait ketentuan pinjaman dana secara rinci. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Spanyol gagal dalam menjaga komitmennya untuk menjamin hak investor atas *fair and equitable treatment* sesuai amanat Pasal 4 (1) BIT Argentina-Spanyol yang menegaskan bahwa “*Each Party shall guarantee... fair and equitable treatment of investments made by investors...*”.

Maffezini juga menduga bahwa telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bank swasta dalam mengelola akun rekeningnya. Ia menambahkan bahwa tindakan bank tersebut juga melibatkan tanggung jawab *Banco de Espana* selaku Bank Pusat Spanyol.<sup>52</sup> Pemerintah Spanyol diduga telah melenceng dari kewajibannya untuk melindungi investasi asing dari tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum sesuai Pasal 3 (1) BIT Argentina-Spanyol yang menegaskan bahwa “*Each Party shall protect... investments made in accordance with its legislation... and shall not obstruct, by unjustified or discriminatory measures, the management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale and, where appropriate, liquidation of such investments*”.<sup>53</sup> Hal ini dapat

dibuktikan dengan tindakan pemerintah Spanyol yang diduga melampaui wewenangnya (*ultra vires*).

Tindakan Banos diduga mencerminkan *ultra vires* yang berarti adanya penyalahgunaan atau melebihi wewenang atau bertentangan dengan instruksi yang diberikan oleh negara. Situasi ini terjadi apabila suatu badan hukum menyangang status resmi sebagai perwakilan negara yang memiliki wewenang secara hukum untuk menjalankan fungsi pemerintahan, namun malah bertindak melebihi kapasitas yang ia miliki.<sup>54</sup> Standar hukum untuk membenarkan adanya *ultra vires* adalah eksistensi fungsi pemerintahan yang telah dilakukan oleh badan hukum dan eksistensi penyalahgunaan atau melebihi wewenang atau bertentangan dengan instruksi.

Langkah pertama adalah penentuan terhadap sifat dari pelanggaran internasional yang dilakukan oleh Banos. Perbuatan yang telah dilakukan Banos sesungguhnya sejalan dengan fungsi yang SODIGA miliki. Fungsi tersebut terdiri dari mengurus akun rekening EAMSA, mengelola pembayaran dan keuangan EAMSA, dan mengintervensi secara umum atas nama EAMSA di hadapan otoritas Spanyol.

Ketiga fungsi tersebut akan dilakukan oleh SODIGA tanpa dibayar sepeserpun. Bukti ini menunjukkan bahwa terdapat fungsi pemerintahan yang dikenal dengan

<sup>52</sup> *Ibid*, para. 72

<sup>53</sup> *Agreement Between The Argentine Republic and The Kingdom of Spain on The*

*Reciprocal Promotion and Protection of Investment, op.cit.*

<sup>54</sup> Pasal 7 *ARSIWA*; *International Law Commission, op.cit.*, pp. 45-56.

istilah layanan publik (*public service*). Layanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah guna memenuhi kebutuhan publik secara umum sehingga memperbolehkan pihak otoritas untuk menggunakan hak prerogatifnya dengan bertindak secara sepihak yang sifatnya memaksa.<sup>55</sup> Hal ini juga yang mengakibatkan bank swasta mengirim dana kepada EAMSA semata-mata karena SODIGA merupakan BUMN Spanyol yang secara tidak langsung mewakili kehendak pemerintahan yang berdaulat sehingga perintahnya harus dilaksanakan.<sup>56</sup> Sebagai catatan, layanan publik akan dianggap komersial jika melibatkan sejumlah uang atau pembayaran yang diberikan kepada suatu badan hukum.<sup>57</sup>

Salah satu alasan yang dapat dipertimbangkan mengenai mengapa tindakan SODIGA dianggap bersifat pemerintahan adalah tidak adanya perjanjian kontrak terkait transaksi komersial. Apabila terdapat kontrak yang mengatur, baik sebelum atau setelah eksekusi transaksi dana, maka tindakan SODIGA dapat bersifat komersial atas dasar kekuatan hukumnya berasal dari kontrak komersial.<sup>58</sup> Pada kasus

EBO melawan Latvia, majelis menyatakan bahwa sifat dari upaya Bandara SJSC untuk mengelola hubungan dengan investor-investornya terkait pengembangan properti *real estate* adalah *acta jure gestionis*. Pernyataan tersebut didasari atas fungsi Bandara SJSC yang telah diatur dalam kontrak yang didalamnya terkandung ketentuan-ketentuan komersial.<sup>59</sup>

Langkah selanjutnya yaitu penentuan atas dugaan *ultra vires*. Banos terbukti wajib meminta izin kepada Maffezini untuk mengeksekusi transaksi dana dan bukti bahwa ternyata tidak ada kontrak yang mengatur transaksi dana. Transaksi dana diberikan oleh bank swasta atas dasar asumsi bahwa akan diadakan suatu kontrak di kemudian hari, namun faktanya tidak ditemukan bukti untuk mendukung asumsi tersebut. Ketiadaan kontrak antara Maffezini dan SODIGA, baik sebelum atau setelah transaksi dilaksanakan, menyimpulkan bahwa Spanyol tidak dapat menyangkal argumen Maffezini bahwa harus ada izin secara langsung kepada dirinya guna mengeksekusi transaksi dana.<sup>60</sup>

Banos juga terbukti bertindak sebagai perwakilan SODIGA. Hal ini dibuktikan dari adanya diskusi antara Banos dengan direktur SODIGA yang mengizinkan Banos untuk bebas melakukan upaya apapun yang dianggapnya perlu. Banos juga seharusnya memohon izin kepada Maffezini karena ia memiliki kesempatan dan waktu yang cukup

---

<sup>55</sup> Hazel Fox & Philippa Webb, *op.cit.*, p. 405.

<sup>56</sup> Emilio Agustin Maffezini v. The Kingdom of Spain, Award, *op.cit.*, para. 78

<sup>57</sup> *Ibid*, p. 484; August Reinisch, *European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement Measures*, EJIL, 2006, p. 829, available at:

<http://www.ejil.org/pdfs/17/4/100.pdf>

[accessed at 1 July 2020];

<sup>58</sup> Hazel Fox and Philippa Webb, *op.cit.*, pp. 413-418.

---

<sup>59</sup> EBO Invest AS, Rox Holding AS and Staur Eiendom AS v. Republic of Latvia, *op.cit.*, para. 343.

<sup>60</sup> Emilio Agustin Maffezini v. The Kingdom of Spain, Award, *op.cit.*, para. 75.



untuk memohonkannya. Perizinan tersebut sangat diperlukan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur di mana dana akan ditempatkan serta ketentuan-ketentuan peminjaman lainnya. Berdasarkan fakta bahwa Banos tidak menghubungi Maffezini guna memohon izin tambahan selain dari direktur SODIGA, menyimpulkan bahwa tindakan *ultra vires* Banos dapat dibebankan kepada SODIGA.<sup>61</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Pada proses penentuan status hukum SODIGA, SODIGA memenuhi tes struktural dan tes fungsional. Tes struktural dibuktikan melalui pendirian SODIGA oleh pemerintah Spanyol serta kepemilikan sahamnya. Tes fungsional dibuktikan melalui beberapa fungsi pemerintahan yang mampu dilakukan SODIGA. Majelis dengan ini menetapkan bahwa Maffezini telah berhasil membuktikan praduga bahwa SODIGA merupakan BUMN yang bertindak atas nama Spanyol sehingga ia dapat digugat oleh Maffezini sebagai negara anggota sesuai definisi Pasal 25 Konvensi ICSID.<sup>62</sup>

Pada tahap penentuan pertanggungjawaban Spanyol atas pelanggaran hukum internasional SODIGA, tindakan-tindakan SODIGA dan Banos terkait transaksi dana tidak dapat dianggap bersifat komersial melainkan *acta jure imperii* dan juga mencerminkan

tindakan *ultra vires*, maka pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada Spanyol. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Spanyol atas kewajibannya untuk melindungi investasi asing sesuai Pasal 3 ayat (1) BIT Argentina-Spanyol. Selain itu, minimnya transparansi terkait transaksi dana dianggap tidak sesuai dengan komitmen pemerintah Spanyol untuk memastikan bahwa investor mendapatkan *fair and equitable treatment* sesuai Pasal 4 (1) BIT Argentina-Spanyol. Maffezini berhak mendapatkan kompensasi uang sebesar ESP 57,641,265.28 (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima peseta dan dua puluh delapan sen) sebagai bentuk pertanggungjawaban negara.<sup>63</sup>

#### V. DAFTAR PUSTAKA

*Agreement Between The Argentine Republic and The Kingdom of Spain on The Reciprocal Promotion and Protection of Investment*, 1992, available at: <https://wipolex.wipo.int/en/text/247353> (accessed on 2 October 2020)

Broches, Aron *The Convention on the Settlement of Investment Disputes: Some Observations on Jurisdiction*, Columbia Journal of International Law, Vol. 5, 1966, 263.

*Ceskoslovenska Obchodni Banka, A. S. v. the Slovak Republic*, ICSID Case No. ARB/97/4, *Decision of the Tribunal on*

<sup>61</sup> *Ibid*, para. 76

<sup>62</sup> Maffezini v. Spain, Decision of Tribunal on Objection to Jurisdiction, *op.cit.*, para. 89.

<sup>63</sup> *Ibid*, para. 83

- Objections to Jurisdiction*, 24 May 1999, available at: <https://www.italaw.com/cases/238>
- Decreto 2182/1972, de 21 de julio, por el que se constituye la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galicia (SODIGA), available at: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1972-1233> [accessed at 1 June 2020]
- Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, with commentaries*, (A/46/10, at para. 28), 1991, available at: [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4\\_1\\_1991.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4_1_1991.pdf) [accessed at 29 May 2020]
- EBO Invest AS, Rox Holding AS and Staur Eiendom AS v. Republic of Latvia*, ICSID Case No. ARB/16/38, Award, 28 February 2020, available at: <https://www.italaw.com/cases/8031> [accessed 29 May 2020]
- EEC Directive 85/337*, June 27, 1985, available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0337> [accessed 27 May 2020]
- Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain*, ICSID Case No. ARB/97/7, Award, 13 November 2000, available at: <https://www.italaw.com/cases/641> [accessed 2 February 2020]
- Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain*, ICSID Case No. ARB/97/7, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, 25 January 2000, available at: <https://www.italaw.com/cases/641> [accessed 16 April 2020]
- Fox, Hazel, and Philippa Webb, *The Law of State Immunity* (3<sup>rd</sup> Ed.), The Oxford International Law Library, 2013, available at: <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780198744412.001.0001/law-9780198744412> [accessed at 22 June 2020]
- International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries*, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1, p. 32-33, p. 36, available at: [https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9\\_6\\_2001.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf) [accessed 16 April 2020]
- Ley de 25 de septiembre de 1941 por la que se crea el Instituto Nacional de Industria*, Boletín Oficial del Estado, BOE-A-1941-9547/1941, available at: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1941-9547> [accessed at 18 June 2020]
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- McLaughlin, Mark, *Defining a State-Owned Enterprise in International Investment Agreements*, ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Volume 34, Issue 3, Fall 2019, available

- at: <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siz011> [accessed at 22 June 2020]
- OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition*, OECD Publishing, 2015, Paris, available at: <https://www.oecd.org/publications/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015-9789264244160-en.htm> [accessed 18 April 2020]
- PNG Sustainable Development Program Ltd. v. Independent State of Papua New Guinea*, ICSID Case No. ARB/13/33, Award, 5 May 2015, available at: <https://www.italaw.com/cases/2770> [accessed 5 May 2020]
- Ramsey, Ian M. and David B. Noakes, *Piercing the Corporate Veil in Australia*, 19 (4), *Company and Securities Law Journal* 250, 2001, available at: <https://pdfs.semanticscholar.org/e36a/ce1eeec1fe3db54ca9f1927e5de431c6c594.pdf> [accessed 17 April 2020]
- Real Decreto Legislativo No. 1302/1986*, June 28, 1986, available at: <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1986/06/28/1302> [accessed 27 May 2020]
- Reinisch, August, *European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement Measures*, EJIL, 2006, available at: <http://www.ejil.org/pdfs/17/4/100.pdf> [accessed at 30 May 2020]
- Report of the Executive Directors on the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*, 1 ICSID Reports 25, 1965, para. 10, available at: <https://icsid.worldbank.org/en/Pages/icsiddocs/REPORT-OF-THE-EXECUTIVE-DIRECTORS-ON-THE-ICSID-CONVENTION.aspx> [accessed 16 April 2020].
- Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco*, ICSID Case No. ARB/00/4, Decision on Jurisdiction, 23 July 2001, available at: <https://www.italaw.com/cases/documents/959> [accessed at 2 June 2020]
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Waste Management, Inc. v. United Mexican States ("Number 2")*, (ICSID Case No. ARB(AF)/00/3) Award, 30 April 2004, available at: <https://www.italaw.com/cases/1158> [accessed 8 May 2020]
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)